



**PEMETAAN DAN PERBAIKAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA  
MENGUNAKAN PRAKARSA AKUNTABILITAS DAN  
TRANSPARANSI**

*Mapping and Improving Village Financial Management Using the  
Accountability and Transparency Initiative*

**Jopinus Saragih<sup>1</sup>, Hendri Mayanta<sup>2</sup>, Joel Fernando Sirait<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Efarina, Indonesia

<sup>1</sup>Email: jr.saragih68@gmail.com

<sup>2</sup>Email: tarighenhendri606@gmail.com

**Abstract**

*This Community Service (PkM) activity focuses on mapping and improving village financial management through accountability and transparency initiatives. Common issues include inconsistencies in planning, implementation, and administrative documents; delayed reporting; incomplete transaction records; unclear role definitions; and limited publication of information regarding the Village Budget (APBDes) and its implementation. The program is implemented through document compliance assessments, mapping of current processes, identification of risk gaps, development of improvement plans (SOPs, checklists, role matrices), strengthening of public transparency mechanisms (village information media, APBDes summary formats), and implementation support. Outputs include a village financial management process map, a package of SOPs and document checklists, a summary report template for the public, and an accountability indicator dashboard.*

**Keywords:** Village Finance; Documents; Village Budget (APBDes)

**Abstrak**

*Kegiatan PkM ini berfokus pada pemetaan dan perbaikan tata kelola keuangan desa melalui prakarsa akuntabilitas dan transparansi. Permasalahan yang umum ditemui meliputi ketidakseragaman dokumen perencanaan-pelaksanaan-penatausahaan, keterlambatan pelaporan, bukti transaksi kurang lengkap, pembagian peran yang belum tegas, serta keterbatasan publikasi informasi APBDes dan realisasi. Program dilaksanakan melalui asesmen kepatuhan dokumen, pemetaan proses as-is, identifikasi celah risiko, penyusunan perbaikan to-be (SOP, checklist, matriks peran), penguatan mekanisme transparansi publik (media informasi desa, format ringkasan APBDes), dan pendampingan implementasi. Luaran meliputi peta proses tata kelola keuangan desa, paket SOP dan checklist dokumen, template laporan ringkas untuk publik, serta dashboard indikator akuntabilitas.*

**Kata Kunci:** Keuangan Desa; Dokumen; APBDes

**PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan berkelanjutan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa

diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola keuangan secara mandiri. Hal ini membawa konsekuensi berupa tuntutan peningkatan kapasitas tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas pelayanan publik serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Namun demikian, berbagai permasalahan masih kerap ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa. Ketidakteraturan dokumen antara tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan seringkali menyebabkan ketidaktertiban administrasi. Selain itu, keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, kurang lengkapnya bukti transaksi, serta belum jelasnya pembagian peran antar perangkat desa menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola yang optimal. Keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya beban administrasi turut memperburuk kondisi tersebut.

Di sisi lain, transparansi informasi keuangan kepada masyarakat juga masih belum berjalan secara maksimal. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta realisasinya belum sepenuhnya dipublikasikan secara rutin dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi serta menurunkan tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang sistematis dan praktis dalam memetakan serta memperbaiki tata kelola keuangan desa. Pendekatan ini harus mampu mengidentifikasi kondisi eksisting, menemukan celah risiko, serta merancang solusi yang aplikatif melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pemetaan proses tata kelola keuangan desa serta penyusunan perangkat perbaikan berupa standar operasional prosedur, checklist dokumen, dan mekanisme transparansi publik.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa melalui penguatan sistem administrasi dan keterbukaan informasi. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk memetakan proses pengelolaan keuangan desa, mengidentifikasi kesenjangan dalam praktik yang berjalan, menyusun perangkat pengendalian internal, serta mendampingi implementasi perbaikan yang berkelanjutan.

## **METODE**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berbasis praktik lapangan. Tahapan awal dimulai dengan koordinasi bersama pemerintah desa untuk menentukan ruang lingkup kegiatan serta mengumpulkan dokumen terkait pengelolaan keuangan desa dalam periode tertentu. Dokumen yang dikumpulkan meliputi dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya dilakukan pemetaan proses tata kelola keuangan desa dalam kondisi aktual atau as-is. Pemetaan ini bertujuan untuk memahami alur kerja yang berjalan, termasuk peran masing-masing pihak yang terlibat. Proses ini dilengkapi dengan audit administratif ringan menggunakan checklist untuk menilai

kelengkapan dokumen serta kesesuaian dengan standar yang berlaku.

Hasil pemetaan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi risiko serta akar permasalahan yang muncul. Analisis ini mencakup aspek duplikasi pekerjaan, ketidaktegasan peran, serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusun desain perbaikan atau to-be yang mencakup penyusunan standar operasional prosedur, matriks pembagian peran, checklist dokumen, serta standar pengarsipan.

Selain itu, kegiatan ini juga mengembangkan prakarsa transparansi melalui penyusunan format ringkasan APBDes dan realisasi anggaran yang mudah dipahami oleh masyarakat. Media publikasi yang digunakan disesuaikan dengan kondisi desa, seperti papan informasi, media sosial, atau forum musyawarah desa.

Tahap selanjutnya adalah pendampingan implementasi, di mana perangkat desa dilatih untuk menerapkan SOP dan menggunakan checklist dalam kegiatan sehari-hari. Pendampingan dilakukan selama satu siklus pelaporan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang dapat berjalan dengan baik. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi dan penyempurnaan perangkat yang telah disusun.

## HASIL

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam tata kelola keuangan desa. Pemetaan proses menghasilkan gambaran yang jelas mengenai alur pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Peta proses ini menjadi dasar dalam penyusunan sistem yang lebih terstruktur dan efisien.

Penyusunan standar operasional prosedur memberikan panduan yang jelas bagi perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. SOP yang disusun mencakup proses pembayaran, penatausahaan dokumen, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta monitoring realisasi anggaran. Dengan adanya SOP ini, proses administrasi menjadi lebih tertib dan terstandarisasi.

Selain itu, checklist dokumen yang dikembangkan membantu memastikan bahwa setiap transaksi didukung oleh bukti yang lengkap dan sesuai. Hal ini berdampak pada meningkatnya kelengkapan dokumen serta berkurangnya temuan administratif. Pengarsipan dokumen juga menjadi lebih rapi dengan adanya standar pengelolaan arsip baik secara fisik maupun digital.

Dalam aspek transparansi, desa mulai aktif mempublikasikan informasi keuangan melalui berbagai media. Ringkasan APBDes dan realisasi anggaran disajikan dalam format yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini meningkatkan aksesibilitas informasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Secara kuantitatif, terjadi peningkatan dalam kelengkapan dokumen transaksi serta ketepatan waktu penyusunan laporan. Selain itu, jumlah temuan administratif mengalami penurunan yang signifikan. Indikator transparansi juga menunjukkan peningkatan, ditandai dengan frekuensi publikasi informasi yang lebih rutin serta meningkatnya jumlah masukan dari masyarakat.

## PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pemetaan proses dan penyusunan perangkat sederhana seperti SOP dan checklist mampu

memberikan dampak yang nyata dalam perbaikan tata kelola keuangan desa. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Pemetaan proses menjadi langkah penting karena memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi eksisting. Tanpa pemetaan yang jelas, perbaikan yang dilakukan cenderung tidak tepat sasaran. Dengan mengetahui alur kerja yang sebenarnya, intervensi dapat difokuskan pada titik-titik yang memiliki risiko tinggi.

Penerapan SOP dan checklist terbukti efektif dalam meningkatkan disiplin administrasi. Perangkat ini berfungsi sebagai alat kontrol yang sederhana namun memiliki dampak besar dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Selain itu, pembagian peran yang jelas melalui matriks tanggung jawab membantu mengurangi tumpang tindih pekerjaan dan meningkatkan koordinasi antar perangkat desa.

Dalam aspek transparansi, penyajian informasi dalam bentuk ringkasan menjadi strategi yang efektif untuk menjangkau masyarakat. Informasi yang terlalu teknis seringkali sulit dipahami, sehingga penyederhanaan menjadi kunci dalam meningkatkan keterbukaan informasi. Dengan adanya akses informasi yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran desa.

Namun demikian, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen perangkat desa. Keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya beban kerja tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan agar sistem yang telah dibangun dapat terus berjalan dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Pemetaan dan perbaikan tata kelola keuangan desa melalui pendekatan akuntabilitas dan transparansi dapat dilakukan secara efektif dengan menggunakan metode yang sistematis dan praktis. Melalui pemetaan proses, penyusunan SOP, penggunaan checklist dokumen, serta penguatan mekanisme transparansi, desa mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara signifikan.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketertiban administrasi, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan dan temuan audit. Selain itu, keterbukaan informasi yang lebih baik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi dalam pengawasan. Dengan demikian, tata kelola keuangan desa yang baik dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Keberlanjutan dari program ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pengawas. Evaluasi secara berkala serta pembaruan sistem perlu dilakukan agar tata kelola keuangan desa dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Cincera, Jan, Petra Biberhofer, Bohuslav Binka, Johan Boman, Lisa Mindt, and Marco Rieckmann. 2018. "Designing a Sustainability-Driven Entrepreneurship Curriculum as a Social Learning Process: A Case Study from an International Knowledge Alliance Project." *Journal of Cleaner Production* 172. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.05.051.
- Rahman Akil, dkk. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Rangga, Y. D. P. et al. (2020) 'Penetapan Jumlah Anggaran dengan Menggunakan Metode Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Kabupaten Sikka', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), pp. 1–810.
- Rasyidi, F. P. & M. (2021) 'Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Kecurangan ACCOUNTING UNIPA VOL.I, JUNI 2022 35 | j u r n a l a c c o u n t i n g V o l . 1 , Juni 2 0 2 2 Laporan Keuangan pada Koperasi Kredit Sube Huter', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP>, 7(1).
- Samosir, M. S. and Herdi, H. (2021) 'Analisis Rasio Keuangan Sebagai Penilaian Kinerja Keuangan Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah Iv Maumere', *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), pp. 506–516.
- Saputra, A., Priadi,E., & Rustamaji (2024). *Analysis Of Slope Stability Due to Illegal Gold Mining In Bengkayang Regency* *Jurnal Teknik Sipil*, 24 (1) 766-777.
- Sekretariat Negara. 2014. *Undang-Undang tentang Desa*. UU No. 6 Tahun 2014. Jakarta.
- Situmorang, D.,M et.al"Analysis Of Accounting Knowledge Behavior and Accounting Recording on Revenue with Cultural Behavior Moderating Variable" *Al-Mal: Journal Of Islamic Accounting and Finance [ONLINE]* Volume 05 Number 02 (Des 31, 2024)

